

► PENGADAAN BARANG

Kadin Minta Proyek MRT Transparan

JAKARTA—Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta meminta Pemprov DKI transparan dalam proyek transportasi massal berbasis rel (*mass rapid transit/ MRT*), terutama dalam hal subkontraktor.

Wakil Ketua Umum Kadin DKI Sarman Simanjorang menilai Gubernur Joko Widodo sudah transparan melakukan tender perusahaan konsorsium utama. Namun masih ada ratusan subkontraktor yang akan dilibatkan dalam proyek tahap pertama Lebak Bulus-Bundaran Hotel Indonesia dengan nilai 125 miliar yen atau sekitar Rp12,5 triliun tersebut.

"Pemprov sudah transparan dalam proses tender menunjuk kontraktor utama konsorsium, tetapi untuk MRT ini masih ada subkontraktor yang jumlahnya ratusan. Ini juga harus transparan, jangan sampai hanya dikelola anak perusahaan. Itu bisa mengarah pada

kartel," kata Sarman dalam pertemuan Kadin di Jakarta, Rabu (8/5).

Dia menyarankan Gubernur Jokowi membuat peraturan agar subkontraktor jangan berasal dari anak perusahaan konsorsium dan mengutamakan bahan asli dalam negeri.

Dengan begitu, katanya, mega-proyek tersebut memberi kesempatan usaha kecil dan menengah (UKM) untuk terlibat di dalamnya. Diperkirakan ratusan pengusaha subkontraktor akan ikut dalam pembangunan MRT, seperti pemasok semen, pemasok besi baja, pemasok beton dan sebagainya.

"Kepemimpinan Jokowi-Ahok [Wagub Basuki Tjahaja Purnama] kan baru ada proyek besar MRT ini. Kami minta transparanlah biar pengusaha kecil ikut dilibatkan, jangan hanya kontraktor gede saja yang transparan," pintu Sarman.

Sementara itu, Ketua Umum Kadin DKI Eddy Kuntadi menegaskan penerapan tender elektronik atau *e-procurement* atas proyek di lingkungan Pemprov DKI yang dibiayai APBD sejak 2006 telah memudahkan pengusaha untuk mengikuti tender yang tercantum dalam Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

Dia mengungkapkan pada 2013 terdapat 190 item proyek yang tersebar di enam wilayah kota dan kabupaten se-Provinsi DKI, di mana masing-masing item memuat nilai tender antara Rp74 juta hingga Rp9,79 miliar.

SULIT

Namun, sambung Eddy, kalangan pengusaha masih banyak mengeluhkan tentang sulit dan rumitnya mengikuti tender elektronik. Kendati sudah berlangsung secara elektronik, dugaan kecurangan masih muncul di kalangan pengusaha.

"Perlunya transparansi proses tender mutlak untuk mencegah peluang kecurangan atau kongkalikong antara peserta tender dan pejabat yang mengurus tender agar tidak menimbulkan kesimpangsiuran di kalangan peserta tender," ucapnya.

Ketua DPP Gabungan Perusahaan Kontraktor Nasional T.B. Pangaribuan mengeluhkan sejak 2011 sebanyak 600 badan usaha anggotanya tidak bisa mengikuti tender di Pemprov DKI karena pengurusan izin usaha jasa konstruksi (IUJK) tidak diberikan.

Gabpeknas sebagai anggota Kadin meminta organisasi mengupayakan kepada Pemprov DKI agar pihaknya bisa mengikuti lelang pekerjaan DKI.

"Kadin sebagai induk organisasi perusahaan harus aktif mengupayakan kepada pemda agar kontraktor bisa mendapatkan pekerjaan lagi," katanya. (Akhirul Anwar)